

TRANSFORMASI PERTANIAN DAN KRISIS AIR DI BALI DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK

Agricultural Transformation and Water Crisis in Bali from View Point of the Political Ecological Perspective

Herlina Tarigan*

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia
Korespondensi penulis. E-mail: herlin4@yahoo.com

Naskah diterima: 14 Juli 2016

Direvisi: 27 Juli 2016

Disetujui: 11 Oktober 2016

ABSTRACT

Mass tourism development directing all policies to support tourism in Bali causes water crisis and major agricultural base change. This paper aims to analyze of agricultural transformation process and water crisis taking place in Bali as well as its impacts on the socio-economic cultural life of the society and the future of tourism itself. Using the perspective of political ecology with review techniques, the obtained results are (1) tourism-oriented development policy brings a broad impact on the environment and the agricultural sector especially land conversion, labor, economy, and water resource utilization; (2) water crisis creates natural resource conflict among various stakeholders and tends to marginalize agriculture; (3) local subak institutional decay and it is potential to suppress natural resources and indigenous culture of Balinese society. In the long term, there is a potential that Bali loses its distinctive cultural appeal as the world tourism destination. Using political ecology perspective, it is suggested that Bali has to develop eco-tourism, agro-tourism, and culture-tourism as soon as possible.

Keyword: *Bali, political ecology, transformation, water crisis*

ABSTRAK

Pembangunan pariwisata massal yang mengarahkan semua kebijakan untuk mendukung pariwisata di Bali telah menyebabkan terjadinya krisis air dan perubahan basis utama pertanian. Tulisan ini bertujuan menganalisis proses transformasi pertanian dan krisis air yang terjadi di Bali serta dampaknya bagi kehidupan sosial-ekonomi-budaya masyarakat dan masa depan pariwisata itu sendiri. Menggunakan perspektif ekologi politik dengan teknik *review* diperoleh hasil bahwa (1) politik pembangunan berorientasi pariwisata membawa dampak yang luas terhadap lingkungan dan sektor pertanian khususnya alih fungsi lahan, ketenagakerjaan, perekonomian, hingga pemanfaatan sumber daya air; (2) terjadi krisis air yang menimbulkan konflik sumber daya alam antarberbagai *stakeholder* dan cenderung memarginalisasi pertanian; (3) terjadi peluruhan kelembagaan lokal subak dan potensial menekan sumber daya alam maupun kultur asli masyarakat Bali. Dalam jangka panjang, Bali potensial kehilangan daya tarik kultural yang khas sebagai destinasi pariwisata dunia. Menggunakan perspektif ekologi politik, disarankan pariwisata Bali lebih mengarah kepada pengembangan ekowisata, agrowisata, dan kulturwisata.

Kata kunci: *Bali, krisis air, ekologi politik, transformasi*

PENDAHULUAN

Salah satu daya tarik paling kuat wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung ke Pulau Dewata Bali adalah pesona etnik yang memuat sosial budaya masyarakat setempat yang khas. Ritual agama dan budaya yang sarat dengan simbol-simbol serta mengandung muatan nilai, norma, dan tradisi. Bagi masyarakat Bali, budaya adalah agama dan agama

adalah budaya (Windia 2013). Konstruksi budaya Bali merupakan proses adaptasi terhadap alam yang diolah untuk keberlangsungan hidup dengan teknik-teknik bertani dan memegang prinsip memelihara keberlanjutan. Sampai hari ini, seluruh seremonial, tata cara, peralatan, perhitungan-perhitungan, simbol-simbol, nilai-nilai, dan benda-benda yang digunakan dalam budaya perilaku bermasyarakat menggunakan unsur-unsur pertanian.

Sistem pertanian dengan teknik pengairan subak yang “cerdas” merupakan salah satu warisan budaya yang merepresentasikan masyarakat Bali tentang kegigihan, kebersamaan, kebijakan komunitas dalam mengelola sumber daya alam, diperkuat dengan ritual seremonial yang sarat nilai keseimbangan (Windia 2010). Pola berpikir dan bertindak yang terencana berupaya menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta. Harmonisasi hubungan *Tri Hita Karana* yang terus dipelihara dan dimanifestasikan menjadi warna dalam seluruh tata kehidupan masyarakat Bali.

Era Orde Baru dipandang sebagai tonggak penting lahirnya pengembangan sektor pariwisata di Bali. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia yang terbesar di Asia melalui program pembangunan pariwisata massal. Semua program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung dan memudahkan pengembangan pariwisata, termasuk regulasi yang ada. Pemerintah pusat secara sentralistik memberikan dukungan kebijakan, anggaran, maupun penciptaan iklim investasi kondusif yang sifatnya mempercepat perkembangan sektor ini. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung merupakan konsekuensi pilihan yang membutuhkan prioritas dalam pembangunan fisik pelabuhan, bandar udara, jalan, hotel, restoran, arena permainan, pentas, dan pasar seni. Sarana pendukung ini membutuhkan sumber daya hutan, tambang, lahan, maupun air yang sangat besar.

Tiga dasawarsa terakhir, pariwisata di Bali berkembang cepat. Investor dalam dan luar negeri berlomba menanamkan investasi dengan membangun berbagai sarana untuk kenyamanan wisata seperti hotel, restoran, kolam renang, dan sebagainya. Hal ini mendorong percepatan alih fungsi lahan dan penggunaan air yang sangat tinggi. Cole (2012) menyebutkan, pariwisata di Bali menggunakan sekitar 65% air sehingga terjadi persaingan dengan pertanian dan keperluan air bersih penduduk setempat. Persaingan meningkat terutama saat kemarau, saat di mana kedatangan wisatawan meningkat tajam.

Penelitian Cole juga menyebutkan, 80% perekonomian di Bali berasal dari sektor pariwisata, namun 85% di antaranya berada di tangan orang non-Bali. Dampak paling parah akibat pengembangan pariwisata khususnya di bidang lahan dan air di alami masyarakat setempat. Dampak tersebut langsung mengenai sektor pertanian, sektor inti budaya masyarakat

Bali yang terlihat dalam berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial budaya. Upaya penyesuaian terhadap krisis air telah mendorong terjadinya konflik dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti sumber mata pencaharian, sistem pertanian, relasi sosial, dan tradisi masyarakat Bali. Penyesuaian dan proses adaptasi sosial-budaya dan teknik pertaniannya dinilai sebagai kekuatan sekaligus kelenturan masyarakat Bali.

Timbul pertanyaan, bagaimana proses transformasi dan krisis air yang terjadi di Bali dan dampaknya bagi kehidupan sosial-ekonomi-budaya masyarakat serta daya tarik Bali sebagai destinasi wisata. Tulisan yang menggunakan metode *review* ini bertujuan membahas persoalan di atas menggunakan perspektif ekologi politik.

PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK DALAM PERSOALAN SUMBER DAYA AIR

Secara historis perkembangan ekologi politik dimulai dari antropologi budaya ke sosiologi lingkungan lalu menjadi ekologi politik. Pertemuan metamorfosis ekologi manusia dengan *political economics* menghasilkan cabang keilmuan ekologi politik. Perspektif ini menganut tradisi pemikiran ala *historical materialism* Marxian dengan atmosfer konflik yang sangat kuat (Forsyth 2003; Robbins 2004).

Penggunaan perspektif ekologi politik sebagai jalan menganalisis persoalan sumber daya air wajib menyentuh ranah politik-ekonomi dan politik-ekologi serta interaksi keduanya yang terjalin secara sosiologis. Ekologi politik berasumsi bahwa perubahan lingkungan merupakan produk dari proses-proses politik sehingga tidak lepas dari keterlibatan proses dialektik dalam politik ekonomi (Dharmawan 2007). Hal ini berarti kombinasi yang terpadu dan kritis antara kajian ekologi dan ekonomi politik (Blaikie dan Brookfield 1987). Asumsinya, lingkungan tidak bersifat netral, melainkan suatu bentuk *politicized environment* yang banyak melibatkan aktor-aktor baik di tingkat lokal, regional, maupun global (Bryant dan Bailey 1997).

Secara empiris, ekologi politik mempertemukan ruang konflik di mana proses produksi kebijakan dan keputusan politik dibuat dengan ruang kekuasaan, di mana para pemegang otoritas kebijakan menjalankan keputusan yang ditetapkan di ruang publik (Dharmawan 2007). Pada ruang konflik bertarung beragam kepentingan yang diejawantahkan dalam bentuk konstitusi, sedangkan proses keadilan diten-

tukan di ruang kekuasaan. Dalam perspektif ekologi politik, kekuatan yang menyebabkan hancurnya sumber daya alam berhubungan erat dengan siapa yang menang di ruang kekuasaan dan memperoleh keuntungan dan siapa yang menderita kerugian dalam pemanfaatannya.

Bryant dan Bailey dalam buku "*The third world political ecology*" (1997) mendeskripsikan gejala ekologi politik dengan menekankan pentingnya pendekatan aktor. Ada lima aktor yang terlibat secara intens dalam pemanfaatan sumber daya alam, meliputi negara, perusahaan *multinational corporation (MNC)*, *non-governmental organization (NGO)*, lembaga internasional, dan *grassroots*. Masing-masing aktor berusaha mengakses sumber daya yang ada untuk kepentingannya berdasarkan pengetahuan dan kekuasaan yang dimiliki. Berpijak pada konsep *politicized environment* berarti persoalan lingkungan tidak terpisah dari konteks ekonomi dan politik.

Asumsi pendekatan aktor menurut Bryant dan Bailey (1997) adalah (1) biaya dan manfaat sumber daya alam dinikmati aktor secara tidak merata; (2) distribusi biaya dan manfaat mendorong ketimpangan; dan (3) dampak sosial ekonomi mempunyai implikasi politik. Itulah sebabnya membicarakan ekologi politik tidak bisa lepas dari sumber-sumber politik yang dapat berpengaruh pada perubahan lingkungan seperti pengetahuan dan kekuasaan, diskursus, kebijakan, ekonomi, maupun politik.

Berdasarkan pengamatan di Indonesia, Dharmawan (2007) memandang unsur yang saling berinteraksi dalam pemanfaatan sumber daya alam secara lebih sederhana. Aktor yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya alam dimasukkan ke dalam tiga kelompok saja, yakni negara, swasta, dan masyarakat. Setiap entitas membawa kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan ini membuka peluang terjadinya konflik. Interaksi antaraktor merupakan "*exercise of power and authority and power struggle*" dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Objek interaksi adalah kepentingan politik yang menghasilkan keluaran berupa konfigurasi tata kelola politik sumber daya alam dan lingkungan.

Menggunakan konsep dan kerangka berpikir yang sama, pertarungan antaraktor dalam pemanfaatan sumber daya alam di Asia pernah diteliti oleh Bryant (1998). Studi ini menunjukkan pengenalan *scientific forestry* oleh para penjajah bangsa Eropa di Asia. Kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan untuk memelihara hutan jati di Jawa dengan alasan membatasi pengolahan hutan dan melarang menanam kayu

selain jati. Alasan ini logis secara *scientific*, tetapi di balik itu sebenarnya ada kepentingan pengembangan kayu jati untuk kepentingan industri di Belanda. Menurut Bryant, terjadi pertarungan kuasa dan pengetahuan *scientific* Barat dan Timur. Pemerintah membandingkan sistem ini sebagai *ecologically good* versus *ecologically bad* yang dipraktikkan oleh pengelola hutan lokal. Guna pengamanan misi ekonomi kolonial, dilakukan penyebaran wacana yang menyebutkan aktivitas petani lokal bersifat merusak lingkungan dan merupakan tindakan kriminal. Kekuasaan yang melekat dalam pengetahuan dan dituangkan dalam kebijakan merupakan wujud pertarungan aktor lewat relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara penjajah dan negara jajahannya, antara korporasi di negara kolonial dengan petani hutan jati di Jawa.

Pada saat yang sama, di ruang konflik masing-masing aktor dengan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki membangun relasi yang mempertarungkan kekuasaannya. Namun, masyarakat lokal menolak *scientific forestry* dan melakukan perlawanan dengan mempertahankan hak-hak lokal melalui *illegal forest use*. Tuntutan ilmuan kolonial yang menyatakan bahwa para petani lokal bertanggung jawab terhadap kerusakan tanah sesungguhnya digunakan untuk membenarkan pajak sekaligus menekan petani agar mengikuti ideologi kapitalis yang disebarkan kolonial dalam rangka mendukung kebutuhan pembangunan ekonomi di negaranya. Berdasarkan pengetahuan dan ideologi yang sama, Bryant dan Bailey (1997) menilai bahwa konservasi lingkungan yang banyak dilaksanakan di negara dunia ketiga jarang sekali dilihat sebagai upaya konservasi itu sendiri, melainkan sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan politik. Indikasi ini terlihat dari pertambahan taman nasional di seluruh dunia terutama di negara dunia ketiga sejalan dengan meningkatnya industri ekowisata.

Studi ekologi politik dilakukan Gurung (1995) mengenai proyek konservasi keanekaragaman hayati di area Annapurna atau disebut *Annapurna Conservation Area (ACA)*. Konservasi di wilayah bagian Barat Kathmandu-Nepal ini merupakan perpaduan upaya memelihara keseimbangan lingkungan antara konservasi alam dengan kawasan taman nasional sebagai bagian dari promosi ekowisata. Aktor yang terlibat adalah lembaga internasional, negara, NGO (*Nepal's King Mahendra Trust for Nature Conservation-KMTNC*), dan *grassroots*. Proyek ACA ini dinilai sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas yang berhasil mengedepankan masyarakat

sekitar secara keberlanjutan. Aktor negara menggunakan wacana dan lembaga global untuk membangun rasa kepemilikan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara lestari melalui pemahaman saling ketergantungan komunitas dengan sumber daya alam. Ruang konflik dan kuasa diminimalisasi dengan penghargaan terhadap aktor yang terlibat, ketidakmerataan biaya dan manfaat diperkecil untuk mengurangi kesenjangan.

Studi Escobar (1998) tentang pergerakan sosial masyarakat kulit hitam Kolombia yang terhimpun dalam *Process of Black Communities* (PCN) bertujuan memperjuangkan hak atas wilayah dan budaya kaum kulit hitam. Ruang konflik terjadi antarnegara yang terlalu berpihak kepada kaum kapitalis berskala besar, melawan aktor masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pertarungan di ruang gagasan akhirnya dimenangkan oleh masyarakat kulit hitam dengan membuahkan hasil berupa pengesahan UU Ley 70 tahun 1993 yang mengakui identitas dan pendidikan pengembangan kebijakan pemerintah agar sejalan dengan budaya kulit hitam.

Tingginya migrasi kaum tani proletar dan pengusaha ke Pasifik berdampak pada sosial ekologi akibat persinggungan budaya serta beragam. Program yang tidak melibatkan masyarakat dinilai mengancam wilayah dan budaya kulit hitam. PCN yang mewakili aktor *grassroots* berhasil memperkenalkan inovasi konseptual penting dalam wacana keanekaragaman hayati dengan pendefinisian "teritori plus budaya" dan kewilayahan sebagai "koridor kehidupan" yang terhubung langsung ke ekosistem lingkungan lainnya, sehingga perannya signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah maupun kewilayahan. Perjuangan ini sekaligus bentuk pertarungan pengetahuan dan kekuasaan antara aktor *grassroots* yang menganut pengetahuan lokal dengan ideologi sosial-ekonomi-kultural-kolektif, melawan aktor negara dan pengusaha yang menerapkan pembangunan dengan membuka iklim yang kondusif bagi bisnis skala besar termasuk bisnis obat bius dalam dan luar negeri (ekonomi-kapitalis-individualis) tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian Escobar (1998) dan Bryant (1998) menunjukkan pengaruh kental politik membentuk konfigurasi relasi kekuasaan yang kompleks, di mana pengetahuan dan kuasa merupakan kunci kekuatan yang mendominasi. Kedudukan *grassroots* berhadapan dengan aktor-aktor lain yang memiliki ideologi, pengetahuan, dan kuasa yang sangat berbeda.

Pemerintah daerah dengan kuasanya dalam menetapkan kebijakan-kebijakan, meluncurkan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan membangun wilayahnya dengan rapi membungkus tujuan politik dan keberlanjutan kekuasaan. Lembaga-lembaga pendukung secara formal dan sistematis diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang terukur. Ideologi ini sangat mudah bersinergi dengan kapitalis yang secara prinsip berorientasi keuntungan dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sinergitas keduanya mengandung kekuatan dan kuasa memanfaatkan sumber daya dalam jumlah besar dan waktu yang relatif cepat. Akhirnya, kelembagaan berbasis komunitas yang berorientasi pada keberlanjutan dengan prinsip pemenuhan kebutuhan komunitas secara adil dan berdaulat 'terancam' eksistensinya, sekalipun lembaga ini hasil konstruksi sosial yang sudah lahir, hidup, dan bertahan dalam kurun waktu yang panjang. Tanpa mengabaikan adanya resiliensi kelembagaan, kekuatan pertarungan ideologi yang diteguhkan melalui aturan legal dan diimplementasikan untuk pencapaian keuntungan ekonomi, dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang berpeluang besar mengganggu keutuhan *social fabric* komunitas pengguna sumber daya alam.

Studi Adiwibowo (2005) tentang perjuangan petani dari empat desa (Kamarora A, Kamarora B, Kadidia, dan Rahmat) sebelumnya memiliki akses dan mencari nafkah di daerah Dongi-Dongi, kawasan inti Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah. Kebijakan konservasi mengharuskan mereka keluar wilayah tersebut. Guncangan hilangnya sumber nafkah membuat mereka melawan kebijakan negara sekalipun mengetahui dan mengakui pentingnya kebijakan itu. Setidaknya konflik data dan kepentingan yang muncul dalam penyusunan draft zonasi, dikuatkan oleh peniadaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekologi, menuai perlawanan dan memunculkan konflik.

Pertarungan para aktor dengan beragam kepentingan di kawasan Dongi-Dongi digambarkan oleh Adiwibowo (2005) sebagai konflik yang multidimensi, tidak hanya melibatkan masyarakat atau *civil society* yang diwakili oleh masyarakat adat dan LSM, elit lokal, elit nasional, maupun negara, tetapi terkait dengan aktor yang berada jauh dari kawasan konflik yakni aktor global, turut meramaikan ruang kontestasi. Negara yang seringkali berkoalisi dengan korporasi nasional dan multinasional menghegemoni *grassroots* melalui pembenaran pengetahuan barat. Sebaliknya, *grassroots* dengan pengetahuan tradisionalnya melakukan

resistensi terbuka maupun tertutup dalam bentuk tindakan perlawanan diam-diam (*laten*) maupun terang-terangan (*manifest*).

Studi ini juga menyebutkan bahwa melalui politik konservasi keanekaragaman hayati, aktor global dan lokal memainkan kuasa dan pengetahuannya untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya hutan. Posisi kekuasaan sangat ditentukan pada wacana konservasi di mana kekuatan narasi mempengaruhi kekuatan akses dan kontrol. Kasus ini manifestasi gagalnya globalisasi wacana konservasi keanekaragaman hayati yang ditunjukkan peran institusi lokal (*Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project-CSIADCP*) yang tidak optimal dan ketidakpahaman terhadap dimensi sosial ekonomi lokal.

Hasil penelitian Adiwibowo et al. (2010) berjudul "*Contested devolution: the political ecology of community-based forest management in Indonesia*" merupakan kritik atas konsep Ostrom yang memahami *property right* melalui pelimpahan kekuasaan dari pusat ke pemerintahan lokal (devolusi) akan membuka peluang terbentuknya kolektif yang akan berjalan baik. Devolusi tidak semata berkaitan dengan *property right*, melainkan akses, yaitu kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari suatu kebijakan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Tiga kasus kehutanan di Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa persoalan penyerahan hak dan tanggung jawab pengelolaan hutan berbasis masyarakat

melahirkan perubahan fundamental kebijakan kehutanan dari milik negara menjadi milik masyarakat, tidak memproduksi perbaikan kesejahteraan masyarakat melainkan menguntungkan bagi elit-elit lokal yang memiliki kemampuan mengakses manfaat dari sumber daya kehutanan.

Interaksi antara negara, nonnegara, dan lingkungan (kasus Hutan Damar di Krui); interaksi proses biofisik, kebutuhan manusia, dan sistem politik yang lebih luas serta interaksi interdependensi individu, komunitas, dan nasional (kasus Hutan Tanaman Rakyat di Konawe); interaksi beragam aktor yang bisa dikelompokkan mewakili negara pusat maupun lokal, masyarakat adat, dan kapitalis (kasus Taman Nasional Lore Lindu). Kuasa pengetahuan membuktikan bahwa produksi dari intervensi terhadap lingkungan sangat berkaitan dengan pengetahuan lingkungan yang keduanya diikat oleh **relasi kekuasaan** (Wulan 2007). Di negara berkembang, proses produksi pengetahuan seringkali memperkuat ketidakadilan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat yang ter subordinat. Ada kecenderungan sikap negara maju menyalahkan negara berkembang atas kerusakan lingkungan sebagai bentuk upaya mengontrol mekanisme manajemen lingkungan global.

Berdasarkan deskripsi studi-studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa analisis berperspektif ekologi politik menyoroti tata kelola sumber daya alam dalam ruang hubungan

Tabel 1. Keragaan aktor dan regim studi ekologi politik

Hasil studi	Aktor berkepentingan	Regim dominan	Kesimpulan
Bryant dan Bailey (1997)	Kolonial, elit lokal, dan petani	Kapitalis	Penolakan <i>scientific forestry</i> adalah <i>illegal xforest use</i> /ketidakpatuhan
Gurung (1995)	NGO, negara, dan <i>grassroots</i>	Environmentalis	Komitmen ACAP yang prolindungan dan masyarakat local
Escobar (1998)	Organisasi lokal (<i>grassroots</i>), negara, dan swasta	Kulturalis dan ekonomi lokal	Kemenangan pengetahuan lokal dengan strategi pendefinisian wacana keanekaragaman hayati
Adiwibowo (2005)	Negara, lembaga internasional, NGO, dan masyarakat adat (<i>grassroot</i>)	Kapitalis berkedok lingkungan	Semua aktor memainkan peran dan pengetahuan yang kompleks, dan untuk mengejar kepentingannya masing-masing
Adiwibowo et al. (2010)	Negara, elit lokal, dan petani	Kapitalis	Dekonsentrasi dan <i>property right</i> tidak memadai bagi berlangsungnya devolusi, peningkatan pendapatan serta pemerataan manfaat SDA
Dharmawan (2005)	Negara, swasta, dan petani	Kapitalis	Reideologi dan tata kelola terpadu DAS menjadi syarat keharusan bagi keberlanjutan sumber daya air
Cole (2012)	Negara, swasta, dan petani	Kapitalis	Salah urus air dan ketidakadilan dalam kebijakan menimbulkan konflik dan kemiskinan.

manusia dengan lingkungannya. Fokus kajian seputar peran aktor yang terlibat dalam sebuah realitas sosial khususnya yang berkaitan dengan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan yang dapat disederhanakan seperti pada Tabel 1. Produksi pengetahuan yang dipakai dalam berelasi merupakan alat efektif dalam meraih dan melestarikan kekuasaan. Kuasa pengetahuan menjadi senjata "pamungkas" dalam ruang publik serta kekuatan dalam ruang kekuasaan guna optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, akibatnya akan selalu ada pihak yang menanggung kerugian dan risiko lingkungan. Perspektif ekologi politik melihat bagaimana kearifan lokal sebagai praksis dalam menyeimbangkan harmoni manusia dengan alam, bagaimana manusia memperlakukan alam dan alam menyediakan kebutuhan material ekonomi bagi manusia.

Studi ekologi politik tentang air hingga hari ini masih sangat terbatas sekalipun beberapa tahun terakhir ini ancaman krisis air bersih telah menjadi fokus perhatian dunia internasional (Suardana 2009). Pada setiap peringatan *World Water Day* selalu ada peringatan untuk mewaspadai kondisi ketersediaan air dan pentingnya untuk mengatasi persoalan secara terintegrasi.

PROSES TRANSFORMASI PERTANIAN MASYARAKAT BALI

Bali merupakan pulau kecil dengan delapan kabupaten dan satu kota yang mengalami perkembangan sosial ekonomi sangat dinamis. Basis dasar ekosistem pertanian di dukung oleh kondisi geografis, teknis, dan kelembagaan petani yang canggih. Hamparan sawah bertingkat dengan 16 daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir sepanjang tahun. Pertanian menjadi basis awal pengembangan ekonomi masyarakat Bali. Peradaban dibangun dari kehidupan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam tertata dengan teratur agar bisa mendukung kehidupan masyarakat dengan seluruh pranata sosialnya. Produksi dan reproduksi kultural maupun religius terbangun dalam sistem sosial, melekat erat dalam makna dan simbol-simbol pertanian.

Menurut sejarah, Bali mendapat pengaruh besar dari kerajaan Majapahit yang sempat mengembangkan wilayah kekuasaannya selama satu kurun waktu di era raja-raja. Masuknya pengaruh kerajaan-kerajaan Islam kemudian hari berhasil meruntuhkan kerajaan Majapahit

dan mengambil alih kekuasaan hampir di semua bidang (Pitana 1993; Purwita 1993). Meski demikian, regim kekuasaan ini tidak memberi perubahan berarti pada kehidupan sosial budaya asli masyarakat. Raja-raja menjadi kekuatan pemerintahan yang memiliki pengaruh besar di masyarakat.

Pada era Orde Baru, pusat-pusat kekuasaan masa lalu tersebut dibiarkan hidup dengan peran dan pengaruh yang cenderung melemah. Fungsi keberadaannya diarahkan pada aspek sosial budaya yang efektif menjadi alat pemersatu publik di tingkat wilayah yang terbatas. Legitimasi masyarakat terlihat dengan masih adanya petani yang mengantar upeti atau *saren taun* pada saat panen, bentuk pajak yang diwajibkan raja di masa pemerintahannya (Tarigan 2015). Pada saat bersamaan modernisasi pertanian melalui revolusi hijau terus dikembangkan, baik dalam sistem pengairan, sistem usaha tani hingga pasca-panen. Kelembagaan subak dipakai sebagai penggerak partisipasi petani tetapi kohesivitas dan peran pemimpinya mengalami pergeseran akibat berbagai kebijakan dan persyaratan yang menyertai program-program dan bantuan.

Sejak Cornelis de Houtman, orang Eropa pertama yang menemukan Pulau Bali (1597), pemerintah Belanda secara intensif mendapat informasi akurat yang akhirnya mendorongnya mengembangkan investasi di Bali. Kolonial kemudian menduduki Bali dan tercatat bahwa sejak masa itu Denpasar mulai memiliki sistem pelayanan air yang bersumber dari mata air di Dusun Riang Gede-Tabanan. Air yang digunakan masyarakat untuk pertanian sebagian dialihkan untuk kepentingan konsumsi rumah tangga masyarakat perkotaan dan fasilitas pariwisata yang sudah mulai dikembangkan. Bersama dengan itu, dibangun sarana penginapan, jalan, pertokoan, dan fasilitas pendukung wisata lainnya.

Pascakemerdekaan, perkembangan sosial-ekonomi-budaya masyarakat Bali relatif stabil. Sumber pendapatan sebagian besar bersumber dari sektor pertanian. Pada saat modernisasi pertanian digerakkan pemerintah, Bali dengan persawahan, ketersediaan air, dan mekanisme kerja lembaga subaknya yang sangat dinamis, mampu bersinergi dengan program pembangunan, dinyatakan berhasil mencukupi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bali bahkan menjadi salah satu daerah andalan pangan beras dan peternakan sapi di Indonesia.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya sarana

transportasi, pemerintah pusat dan daerah membuat kesepakatan untuk menjadikan Bali sebagai salah satu tujuan wisata dunia terbesar di Asia. Sekalipun pengembangan wisata dimulai sejak masa kolonial, era Orde Baru merupakan tonggak penting lahirnya komitmen pemerintah yang direalisasikan dengan membangun sektor pariwisata secara massal, pariwisata yang melibatkan wisatawan dalam jumlah banyak dengan pengaturan yang hampir standar baik dalam hal pengaturan waktu, tempat kunjungan, fasilitas penerbangan, maupun hotel yang digunakan (Caretourism 2013). Seluruh program pembangunan diarahkan untuk mendukung dan memudahkan pengembangan pariwisata, termasuk regulasi dan perizinan.

Melajunya sektor pariwisata membawa dampak yang luas baik dari sisi pembangunan fisik bangunan, alih fungsi lahan, ketenagakerjaan, transportasi, perekonomian, hingga pemanfaatan sumber daya alam. Transformasi tenaga kerja dengan laju urbanisasi yang tinggi merupakan salah satu dampak lain berkembangnya pariwisata yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian. Tenaga kerja muda merespon peluang kerja yang terbuka di kawasan pengembangan pariwisata dan meninggalkan sektor pertanian yang dinilai lambat dan kurang menjanjikan pendapatan yang tinggi (Tarigan 2004).

Awal dekade 90-an terjadi perubahan signifikan dalam sumber mata pencaharian utama masyarakat Bali, dari 70% penduduk yang hidup dari sektor pertanian pada tahun 1989 menjadi tinggal 41,5% pada tahun 1995 (Wiguna dan Surata 2008). Perubahan cepat ini terjadi akibat adanya perubahan arah kebijakan membangun sektor pariwisata sebagai sektor andalan pertumbuhan ekonomi Bali. Sektor ini secara cepat membuka kesempatan dan lapangan kerja baru, peluang berusaha baru yang menjadi faktor penarik kuat bagi penduduk untuk melakukan transformasi pekerjaan dan usaha dari pertanian ke sektor industri dan jasa.

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata merupakan konsekuensi pilihan yang membutuhkan prioritas dalam pembangunan fisik pelabuhan, bandar udara, jalan, hotel, restoran, arena permainan, pentas, dan pasar seni. Sarana pendukung ini membutuhkan sumber daya hutan, tambang, lahan, maupun air yang sangat besar. Laju pembangunan pariwisata berdampak pada harga lahan, namun berbanding terbalik dengan *land rent* pertanian. BPS Provinsi Bali mencatat, selama periode 2000–2015, di Provinsi Bali terjadi penurunan luas lahan pertanian dari

563.667 ha menjadi 354.406 ha atau turun sebesar 37,12%. Di dalamnya termasuk penurunan luas lahan sawah dari 85.776 ha menjadi 80.542 ha atau berkurang 0,93%. Khusus di Kabupaten Tabanan sebagai kantong pangan Bali, pada periode yang sama, terjadi penurunan luas lahan pertanian dari 83.938 ha menjadi 62.432 ha, termasuk penurunan luas sawah dari 23.358 ha menjadi 21.962 ha atau berkurang 5,98%.

Perubahan lain dapat dilihat dari kontribusi lapangan usaha dalam PDRB periode 2005–2009 mengalami perubahan signifikan, misalnya untuk tanaman bahan makanan turun dari 22,33% menjadi 18,80%, sementara untuk perdagangan, hotel, dan restoran meningkat dari 22,56% menjadi 23,07%. Pesatnya perkembangan sektor pariwisata ditandai juga oleh maraknya kehadiran hotel dan penginapan untuk melayani wisatawan. Bertambahnya fasilitas ini umumnya mengambil alih lahan pertanian. BPS Provinsi Bali (2012) mencatat jumlah hotel berbintang di Bali sebanyak 249 buah dan penginapan sejumlah 1.801 dengan jumlah kamar mulai kurang dari 10 hingga lebih dari 100. Kabupaten Badung merupakan daerah yang paling banyak hotel maupun penginapannya, konsekuensinya Badung membutuhkan dukungan ketersediaan air dari kabupaten Tabanan (Tarigan 2015). Realitas di atas menunjukkan proses terjadinya transformasi pada aspek ekonomi masyarakat Bali yang menunjukkan posisi daya tarik sektor pertanian semakin berkurang.

Pertanian sebagai basis kebudayaan mengalami pelunturan bahkan tidak berhasil diwariskan antargenerasi. Daya tarik sektor ini sebagai pekerjaan maupun usaha dipandang kurang prospektif. Angkatan kerja usia sektor pertanian terus menurun tajam, fenomena *aging farmer* yang kuat hingga menularkan virus ke dunia akademik. Dekade terakhir terjadi penurunan tajam jumlah mahasiswa di Fakultas Pertanian Universitas Udayana dan sempat terancam tutup. Persoalan serius ini memunculkan aksi para akademisi bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberi rangsangan beasiswa penuh kepada setiap lulusan sekolah lanjutan atas yang masuk kuliah di Fakultas Pertanian dengan syarat bersedia kembali ke desa untuk membangun pertanian.

KRISIS AIR DAN AKSES SUMBER DAYA DI BALI

Memburuknya kondisi lingkungan menjadi sumber masalah air dan berbagai risikonya.

Stern et al. (2006) dan McCarl dan Reilly (1999) menyebutkan faktor penyebab krisis air dari sisi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas mencakup perubahan iklim global dalam jangka panjang, intensitas, dan pola sebaran spasial, maupun curah hujan temporal. Akibatnya, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Keduanya berisiko besar terhadap sektor pertanian. Selain itu, persoalan ekologi daerah aliran sungai (DAS) yang terus memburuk menyebabkan degradasi sumber-sumber air.

Penelitian Pusat Studi Pembangunan IPB di DAS Citanduy menyebutkan, penebangan hutan secara masif-ekstensif di kawasan hulu telah meniadakan zona preservasi penahan longsor sehingga bentang alam menjadi sangat labil. Zona hilir merupakan kawasan yang menderita risiko paling parah (Dharmawan 2005). Eksploitasi berlebihan tanpa menerapkan upaya keberlanjutan lingkungan mengakibatkan pihak hilir menerima risiko kekurangan pasokan air untuk keperluan kebutuhan hidup dan kegiatan ekonominya. Bagi petani, ancaman terhadap pelaksanaan kegiatan usaha tani merupakan ancaman bagi seluruh kehidupan petani yang menyandarkan hidup pada penghasilan pertanian.

Studi Kertiwa dan Pawitan (2010) menemukan beberapa faktor penyebab yang berpengaruh terhadap krisis air. (1) Tekanan jumlah penduduk yang menggunakan air melampaui daya dukung lingkungan menyebabkan terjadi degradasi daya tampung lingkungan. (2) Kerusakan hutan (deforestasi) yang melaju cepat. Kerusakan hutan di Indonesia misalnya terjadi dari 1,6 juta ha per tahun periode 1985–1997 menjadi 3,8 juta ha per tahun periode 1997–2000. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. (3) Lahan kritis yang semakin meluas. Secara nasional, dari 13,1 juta ha lahan kritis pada tahun 1992 menjadi lebih dari 18,5 juta ha tahun 2011 menyebabkan resapan air berkurang. (4) Kerusakan daerah aliran sungai dibuktikan dengan sebaran DAS kritis dari 22 DAS pada tahun 1984 menjadi 39 DAS pada tahun 1994, lalu menjadi 62 DAS pada tahun 1999, bahkan mencapai 282 DAS tahun 2010. (5) Laju alih fungsi lahan sawah ke nonsawah atau non-pertanian menyebabkan perluasan permukaan kedap (*impervious area*) sehingga memicu banjir sekaligus penurunan infiltrasi yang mendorong penurunan cadangan air tanah.

Salah satu hasil studi-aksi tentang sumber daya air pernah dilakukan PSP-IPB bekerja sama dengan *United Nation Development*

Program – UNDP Partnership Indonesia. Studi berperspektif ekologi politik ini menuliskan besarnya risiko yang ditanggung oleh berbagai pihak akibat tata kelola air yang tidak terintegrasi. Krisis lingkungan seperti rusaknya hutan dan marginalisasi daerah sepanjang daerah aliran sungai (DAS) meningkat tajam setelah diserahkan kepada daerah dengan diberlakukannya UU tentang Otonomi Daerah. Pemanfaatan sumber daya tanpa disertai biaya pemeliharaan secara berkelanjutan menyebabkan ketidakterjaminan air bagi kepentingan masyarakat yang terus meningkat dan pemanfaatan beragam.

Belakangan, persoalan air sebagai sumber daya terbuka milik bersama (*common pool resources*) yang bisa diakses oleh semua pihak mulai banyak dibahas. Ancaman krisis air yang sudah terjadi di beberapa negara diperkirakan dalam waktu cepat menjadi persoalan serius di Bali. Besarnya jumlah migrasi penduduk dan wisatawan yang datang ke Bali menyebabkan konsumsi air untuk sektor wisata mencapai 65%, jauh melebihi pemakaian air oleh penduduk setempat yang hanya sekitar 35%.

Perkembangan lokasi wisata yang meliputi wisata gunung hingga wisata pantai membuka ruang-ruang tertutup sebagai hutan sehingga mengurangi daya penahan air. Hal ini menciptakan kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air, dan ini potensial menyebabkan konflik. Pengamat lingkungan dan sumber daya air menyebutkan bahwa peperangan air sudah di depan mata. Menurut Homer-Dixon (1994), potensi konflik terjadi karena kelangkaan sumber daya tidak saja dipicu oleh peningkatan permintaan, tetapi juga karena ketidakadilan dalam mengaksesnya.

Penelitian Cole tahun 2012 menganalisis pemanfaatan air di Bali, khususnya pemanfaatan air untuk pengembangan pariwisata. Cole (2012) menyebutkan, konsentrasi pemerintah Bali yang besar pada pengembangan pariwisata, kurang memperhatikan pengelolaan air yang menjadi salah satu sumber daya penting bagi masyarakat, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata maupun sektor lain seperti pertanian, industri dan perumahan. Pengembangan pariwisata yang sarat kapital didukung oleh berbagai kemudahan dan kelonggaran peraturan dalam pengelolaan maupun pemanfaatan air. Kebijakan pemerintah kurang menyentuh upaya menjaga keberlanjutan sumber-sumber air maupun penataan yang berbasis pada keberlanjutan pariwisata itu sendiri. Praktik salah urus ini menimbulkan banyak konflik di masyarakat, baik konflik antarsektor, konflik

antarwilayah administrasi, maupun antarmasyarakat yang mengancam Bali pada kerawanan ketersediaan air sekaligus kerawanan sosial.

Politik pembangunan berlandaskan strategi modernisasi memacu pemerintah melakukan pembenahan sistem pemerintahan. Pembangunan fisik sarana dan prasarana seperti jalan, rumah sakit, sekolah-sekolah, maupun pasar menjadi faktor utama mendorong sektor-sektor perekonomian, termasuk sektor pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan baku material yang besar dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Pengerukan komponen sungai seperti batu, pasir, dan kerikil menyebabkan pendalaman sungai dan menghilangnya cekungan sungai yang berfungsi menahan air.

Bersamaan dengan hal di atas, konversi tanaman tahunan yang berfungsi sebagai resapan air ke arah tanaman semusim melalui program pengembangan komoditas hortikultura di wilayah dataran tinggi berdampak pada percepatan erosi sekaligus kontaminasi air dengan beragam zat kimia yang berasal dari saprodi yang digunakan. Akibatnya, kualitas air sungai menurun, gampang meluap saat hujan, dan mengalir lancar ke laut tanpa bisa ditahan untuk dimanfaatkan pada waktu sesudahnya. Realitas di atas menunjukkan bahwa modernisasi yang dipakai pemerintah sebagai alat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi mempunyai efek samping (*side effect*) yang merugikan bagi lingkungan dan keberlanjutan pertanian.

Sejak pariwisata massal menjadi prioritas utama pembangunan Bali, segala sesuatu untuk mendukung sektor ini menjadi prioritas dan diberi kemudahan. Sarana prasarana dibangun, perizinan dipermudah, prosedur investasi disederhanakan, dan sumber daya manusia dilatih. Secara kasat mata, semarak investasi dapat dilihat dengan munculnya beragam kegiatan ekonomi di bukit-bukit, sawah, dan DAS berupa beragam usaha dan pekerjaan baru seperti usaha pengembangan penginapan, arena wisata alam, dan restoran. Perkembangan ini menekan pemanfaatan lahan sekaigus sumber daya air pertanian.

Sumber mata air yang mengalir di sungai untuk kepentingan pertanian dan mandi-minum masyarakat, dimanfaatkan juga oleh aktor-aktor pesaing subak di antaranya PDAM, restoran dan penginapan, pengusaha air minum isi ulang (AMIU), maupun pengusaha air minum dalam kemasan (AMDK). Air dieksploitasi dan didistribusikan ke perkotaan terutama ke daerah kantong-kantong wisata. Aneka fasilitas yang mengamankan wisatawan seperti kolam renang,

jasa salon, *laundry*, dan sebagainya, dilengkapi sebagai daya tarik sebuah penginapan atau arena wisata. Petani dan penduduk perdesaan yang berkedudukan di area DAS akhirnya harus membeli air untuk keperluan konsumsinya.

Sampai saat ini, upaya keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air belum berjalan dengan baik. Menurut Pasandaran (2005), diperlukan kerangka keterpaduan yang berpijak pada tiga fungsi dasar yang berhubungan secara selaras. *Pertama*, fungsi alokasi air yang bertujuan memperbaiki efisiensi alokasi air untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Proporsi penggunaan air ditetapkan melalui analisis kebutuhan, identifikasi potensi sumber air dan curah hujan efektif (Sosiawan dan Subagyo 2009). *Kedua*, fungsi sosial yang bertujuan memperbaiki akses terhadap air berdasarkan asas keadilan. *Ketiga*, fungsi keberlanjutan yang bertujuan memelihara eksistensi dan keutuhan sumber daya air. Cakupan keterpaduan tidak saja ditentukan oleh keselarasan hubungan antarelemen sumber daya seperti hubungan antara air dan lahan, air permukaan dan air tanah, hubungan antara hulu dan hilir, tetapi juga hubungan antarsektor penggunaan seperti air untuk irigasi, industri, keperluan domestik, dan air untuk keperluan lingkungan dalam suatu wilayah sungai.

Penelitian Tarigan (2015) di Bali menemukan bahwa pengelolaan sumber daya air yang belum adil sangat potensial memicu konflik. Sampai tahap tertentu, ada upaya petani melalui kelembagaan subak melakukan proses adaptasi. Keterbatasan akses terhadap air mendorong petani subak semakin intensif melakukan pergiliran tanam dan pinjam air. Petani yang berada dibagian hilir melakukan perubahan indeks pertanaman padi dan merubah pola tanam. Penurunan produktivitas akibat keterbatasan air membuat sebagian petani kekurangan biaya produksi untuk musim tanam berikutnya dan memilih untuk membiarkan sawahnya tidak digarap. Dalam jangka panjang, sawah yang dianggap kurang mampu mencukupi kebutuhan keluarga petani dijual dan akhirnya beralih fungsi untuk penggunaan nonpertanian. Realitas ini menguatkan temuan Bryant dan Bailey (1997) yang menyebutkan manfaat sumber daya air dinikmati para aktor secara tidak merata dan distribusinya mendorong ketimpangan. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan mempunyai implikasi politik dengan sumber-sumber yang berpengaruh pada perubahan lingkungan meliputi pengetahuan dan kekuasaan, diskursus, kebijakan, ekonomi maupun politik.

Negara merupakan lembaga terbesar yang paling bertanggung jawab dalam menjamin kepentingan masyarakat di wilayah publik. Ketika negara tidak berpihak pada kepentingan publik, maka pertarungan antaraktor dalam mengakses sumber daya alam akan berlangsung secara tidak adil. Undang-undang dan kebijakan yang berlaku menggambarkan keputusan politik negara dalam ruang konflik di mana pertarungan antaraktor berlangsung. Menurut Bryant (1998) dan Escobar (1998), seperti halnya keputusan-keputusan politik lingkungan yang umum, pemanfaatan sumber daya air harus berpijak pada kepentingan lingkungan atau kepentingan publik. Perlu ketelitian dalam mencermati perlindungan lingkungan yang banyak dilaksanakan di dunia, termasuk di negara dunia ketiga. Hal ini penting agar tidak dilihat sebagai upaya perlindungan itu sendiri karena seringkali justru dipakai sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan politik (Bryant dan Bailey 1997).

Diskursus kelangkaan air dan pentingnya melihat sumber daya ini sebagai komoditas ekonomi bukan sepenuhnya memuat tujuan perlindungan dan keberlanjutan sumber daya, tetapi berfungsi menjadi alat bagi kapitalisme membuat aturan main melalui lembaga-lembaga resmi internasional seperti World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), atau World Bank yang bertujuan memperpanjang masa penguasaan dunia oleh sistem kapitalisme. Ini merupakan peluang bagi lembaga kapital dunia untuk mengembangkan politik bisnisnya bagi negara-negara dan korporasi yang memiliki ideologi politik ekonomi yang sejalan.

Konflik antaraktor pemanfaat sumber daya air di Bali terbangun dari ideologi dan regim yang berbeda dalam memanfaatkan sumber daya alam yang semakin langka. Orientasi kepentingan, pengetahuan, dan kemampuan mengakses sumber daya menunjukkan korporasi-korporasi pariwisata yang memperoleh manfaat terbesar. Korporasi menggunakan politik otoritas pemerintah pusat dan daerah dalam memperjuangkan akses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air untuk pengembangan kegiatan ekonominya.

Beberapa mata air di Tabanan, Karangasem, dan Gianyar yang memiliki kuantitas dan kualitas, baik yang sedianya dimanfaatkan untuk mencukupi konsumsi penduduk dan kebutuhan pertanian sekitarnya, akhirnya beralih menjadi bahan baku penting dalam pengembangan usaha perhotelan dan usaha pendukung pariwisata. Hal ini yang memberi keuntungan besar bagi para kapitalis dan negara lewat nilai tambah

dan pembayaran pajak usaha. Distribusi keuntungan ini jarang sekali dirasakan oleh masyarakat setempat atau petani subak. Sebaliknya, petani subak menjadi pihak yang dirugikan karena menghadapi kekurangan ketersediaan air untuk kebutuhan usaha taninya.

Beberapa konsekuensi yang ditanggung petani subak dan berpengaruh kepada ketahanan pangan adalah penurunan indeks pertanian, gagal panen, perubahan komoditas, dan menyebabkan pengurangan pendapatan. Fakta empiris ini menunjukkan pertarungan dalam kerangka ideologi dan regim yang berbeda menyebabkan pembagian manfaat tidak merata. Realita ini sekaligus membuktikan bahwa kemampuan mengakses dan memperoleh manfaat sumber daya air lebih ditentukan oleh politik pengetahuan dan kekuasaan, daripada batas-batas jarak dan kepemilikan.

Pemanfaatan mata air oleh para pengusaha melalui legitimasi pemerintah, memiliki kewenangan yang diatur dalam kebijakan. Sekalipun wacana yang digulirkan berbeda-beda, politik ekonomi yang dilaksanakan juga berbeda, para aktor bergerak pada arah yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan dengan mengakses sumber daya. Air yang sebelumnya dikuasai, dimanfaatkan, dan dipelihara sepenuhnya oleh komunitas subak dan masyarakat perdesaan, kini diakses kuat oleh aktor pengusaha perhotelan, air minum, dan industri. Ruang pertarungan ini disadari sepenuhnya menjadi arena benturan tujuan dan kepentingan antarorang atau kelompok yang sebelumnya berjalan seiring, mulai saling mengganggu satu sama lain. Upaya pengusaha memenuhi pangsa pasar yang terbuka luas dan kebutuhan untuk memaksimalkan keuntungan bersifat menghalangi atau membuat tindakan petani subak menjadi tidak efektif. Kondisi ini memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik meningkat menjadi sebuah pertarungan, benturan, suatu pergulatan, pertentangan kepentingan, opini-opini atau tujuan-tujuan. Dengan kata lain, pertarungan kepentingan terhadap sumber daya air menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal

Keterbatasan ketersediaan air di tingkat petani memunculkan konflik internal yang dipicu oleh faktor kelangkaan air terutama pada musim kemarau. Konflik terjadi antarpetani dalam satu hamparan maupun antara petani yang lahannya di bagian hulu sungai dengan petani di bagian hilir. Hubungan petani yang dibangun secara internal dalam kelembagaan subak dengan sangat baik berpotensi mendapat friksi akibat tekanan pada berbagai unsur mendasar kelembagaan ini. *Awig-awig dan perarem* sebagai

produksi kekuasaan komunitas subak seringkali mendesak untuk direvisi dengan penyesuaian-penyesuaian lingkungan yang berubah secara cepat. Diperlukan pertanian dan kelembagaan subak yang dinamis dalam mengadaptasi perkembangan lingkungan eksternal yang terus bergerak. Perancang kebijakan pembangunan perlu menempatkan pertanian dan kelembagaan subak sebagai bagian dasar dari percepatan transformasi ke arah industrialisasi pertanian di perdesaan agar ada keberpihakan yang kuat secara politis maupun anggaran pembangunan (Pranadji dan Suhaeti 2012). Tatanan struktur ekonomi masyarakat Bali ke depan perlu dibangun berlandaskan pada kekuatan ekosistem, masyarakat, budaya, dan kreativitas kolektif dari seluruh elemen masyarakat sipil di Bali.

Konflik eksternal berkembang dari kebijakan pemerintah memberi akses yang besar kepada PDAM untuk mengelola dan memanfaatkan air. PDAM dengan teknologinya bisa memperoleh keuntungan besar, secara bersamaan penduduk perdesaan dan petani subak menderita kekurangan air untuk usaha tani dan berdampak langsung pada pendapatan rumah tangga. Ketimpangan ini memiliki implikasi politik dalam pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya air dan menimbulkan perubahan kekuasaan dalam hubungan satu aktor dengan aktor lain (Bryant dan Bailey 1997). Pertarungan antaraktor untuk memperoleh keuntungan dalam mengeksploitasi lingkungan merupakan titik sulut memanasnya ruang konflik. Dalam konteks sumber daya air di Bali, dibutuhkan resolusi prinsip keadilan yang intinya pada pembagian hak dan kewajiban. Hal ini perlu diatur dalam konsep kesamaan dan hubungan timbal balik.

Perubahan lingkungan yang berdampak pada krisis air di atas merupakan proses politik dengan kontestasi pertarungan antaraktor yang berkepentingan dalam mengakses dan memperoleh manfaat sumber daya air. Interaksi sosial yang terbangun dari hubungan-hubungan sosial melalui beragam kelembagaan digunakan aktor yang kuat sebagai acuan kebijakan dan disosialisasikan sebagai sesuatu yang benar. Pertimbangan rasional sebagai dasar tindakan rasional para aktor mempertemukan semua azas kepentingan pada ruang pertarungan politik. Relasi kekuasaan mendudukan pihak-pihak yang lemah dan yang kuat dalam arena kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya yang terjadi di Bali tidak memadai dipandang sebagai kesalahan dalam kebijakan atau manajemen teknis semata, melainkan memiliki sumber-sumber politik (Bryant dan Bailey 1997).

Analisis melalui pendekatan yang berpusat kepada aktor mendorong kajian ini memasuki ranah ekonomi, ekologi, politik, dan sosiologi sekaligus.

Penelitian perspektif ekologi politik memandang setiap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan, selalu ada para aktor yang hadir dengan mengusung regim yang berbeda. Menurut Escobar (1998), ada tiga regim *nature* yang paling sering terlibat, yaitu regim alam kapitalis (pengusaha), regim alam organik (kelompok pengelola berdasarkan pengetahuan lokal), dan regim alam teknokrat (pemerintah atas nama negara). Ketiga regim memiliki gagasan masing-masing yang dipertarungkan demi kelancaran pengaruh kekuasaan. Sampai hari ini, regim alam kapitalis berperan sangat dominan. Oleh karena itu, secara kritis Forsyth (2003) menganjurkan agar analisis menggunakan pendekatan ekologi politik perlu mengeksplorasi lebih jauh keterkaitan kapitalisme dengan kerusakan lingkungan. Lebih detail, penelitian Tarigan (2015) mengurai aktor-aktor yang terlibat dalam konflik sumber daya air di Bali.

Aktor pertama yang memiliki peran paling besar adalah negara. Kekuasaan negara sebagian besar berasal dari kewenangannya untuk bertindak atas nama "kepentingan nasional". Menurut Bryant dan Bailey (1997), peran negara sebagai aktor yang berdaulat dan memonopoli seringkali menggunakan cara pemaksaan dalam suatu wilayah dan sumber daya tertentu. Secara politis, kalkulasi-kalkulasi pemanfaatan air antarsektor menjadi pertimbangan dominan. Keberpihakan sektor dan aktor yang terlibat diekspresikan dari kebijakan yang berlaku. Pada zaman kolonial, sikap politik ini terlihat pada basis administrasi negara` Kolonial menaklukkan masyarakat dan lingkungan pada prinsip-prinsip 'ilmiah' dalam rangka 'merasionalisasi' lingkungan sosial dan alam di bawah yurisdiksi mereka (Bryant dan Bailey 1997).

Rekayasa sosial dan lingkungan di abad ke-19 dan ke-20 telah disambut oleh perlawanan rakyat yang meluas di seluruh dunia ketiga. Kedudukan negara sebagai aktor kunci dalam masalah manajemen lingkungan banyak menuai kritik. Terkait dengan sistem kapitalis, negara berperan sebagai fasilitator dan aktor masalah lingkungan kontemporer yang merupakan produk sampingan penting dari sistem kapitalis sendiri (Johnson 1990). Namun, negara juga aktor kunci dalam mencari solusinya. Peran ini seringkali terhambat karena terikat pada aturan-aturan, cara-cara, dan kepentingan kapitalis.

Oleh karena itu, negara seharusnya bertanggung jawab secara eksplisit untuk pengelolaan sumber daya hayati dan fisik. Namun, aktor ini seringkali membuat solusi yang memunculkan masalah lingkungan, bahkan dalam banyak kasus memberikan kontribusi untuk memperburuk masalah yang ada (Bryant dan Bailey 1997).

Aktor kedua adalah *multilateral institutions* yang memiliki dana besar dan dengan pengetahuannya mampu mengontrol pihak-pihak yang berpengaruh inisiasi dan tindak lanjut wacana yang berkembang. Dalam rangka pengembangan kapital, aktor ini menerapkan politik pinjaman dengan mensyaratkan berbagai ketentuan. Lembaga ini merupakan alat-sejajar negara maju dalam melakukan ekspansi dominasi pengaruhnya pada negara-negara berkembang dan yang memiliki sumber daya berlimpah. Lembaga ini menawarkan pinjaman modal. Umumnya persyaratan yang ditetapkan berorientasi pada ideologi yang sangat modernis. Hal ini membuka celah bagi menjamurnya sistem perekonomian kapitalis. Sistem perekonomian ini telah menciptakan kemiskinan dan ketergantungan banyak negara dunia ketiga terhadap institusi ini. *Multilateral institutions* yang paling banyak berperan di Indonesia di antaranya Bank Dunia (World Bank), International Monetary Fund (IMF), Food and Agriculture Organization (FAO), dan Asian Development Bank (ADB).

Aktor ketiga adalah korporasi, mencakup perusahaan domestik maupun pengusaha multinasional, khususnya mereka yang bergerak di bidang pariwisata maupun pengelolaan sumber daya air langsung. Aktor memiliki orientasi bisnis yang memandang sumber daya air sebagai peluang usaha potensial untuk menghasilkan keuntungan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Orientasi bisnis dengan mayoritas regim kapitalisme banyak berkoalisi dengan aktor lain khususnya negara dan *multilateral institutions* dalam pencapaian manfaat optimal dari sumber daya yang ada. Faktor modal, teknologi, dan pengetahuan merupakan kekuatan aktor dalam mengembangkan upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

Aktor kedua dan ketiga meliputi kaum kapitalis lokal, nasional maupun global. Perannya memanfaatkan sumber daya air untuk perolehan nilai ekonomi yang optimal, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keperluan semua pihak yang bersedia membayar biaya fasilitasi dan pengolahan. Pengusaha AMDK, PDAM, AMIU, maupun pengusaha hotel-restoran mengambil

air berkualitas baik dengan target utama masyarakat perkotaan dan konsumsi kebutuhan wisatawan. Pencapaian tujuan komersial melalui dukungan pemerintah dan modal yang dimiliki berikut risikonya. Ideologi politik ekonomi dan lingkungan yang dipakai umumnya *kapitalis profitisme*. Wacana yang digulirkan bahwa air adalah komoditas ekonomi.

Aktor keempat adalah lembaga nonpemerintah (NGO) atau LSM baik tingkat lokal maupun internasional. Lembaga ini mengusung keberpihakan pada lingkungan atau *grassroots* sebagai pihak yang lemah. Lembaga Walhi merupakan lembaga nonpemerintah yang secara aktif melakukan kajian-kajian dan berfungsi sebagai kontrol aktif terhadap para aktor lain yang mengeksploitasi lingkungan.

Aktor kelima adalah masyarakat atau *grassroots*. Sistem kehidupan aktor ini sangat tergantung pada keadaan dan pemeliharaan sumber daya air. Aktor ini memanfaatkan sumber daya air sesuai kebutuhannya dan menjunjung tinggi hak kebersamaan. Berpijak pada hakikat pentingnya air bagi keberlangsungan hidup, aktor berusaha memelihara lingkungannya dengan memproduksi aturan dan norma yang diberlakukan bagi semua anggota masyarakatnya. Secara kuantitas, jumlahnya cukup besar dengan status, peran, latar belakang, dan kemampuan beragam. Pada berbagai kajian, aktor *grassroot* merupakan aktor yang lemah dan cenderung mengalami marginalisasi. Oleh karena itu, kekuatan ikatan internalnya merupakan kekuatan yang sering diandalkan untuk memperjuangkan akses terhadap sumber daya yang ada.

Berdasarkan sejarah pertanian di Bali, aktor masyarakat adalah pionir pemelihara lingkungan dan pemanfaat air yang konsisten. Ideologi politik ekonomi dan lingkungan yang dipakai umumnya *welfarian kolektivisme* dengan wacana yang digulirkan bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus dipergunakan seperlunya, dipelihara keberlanjutannya, dan adil bagi semua pihak yang hidup berdekatan dengan sumbernya. Pengetahuan tradisional tentang fungsi air dalam berusaha tani menyebabkan teknik mengolah tanah, memilih benih dan menanamnya, melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit hingga panen dan pemasaran, mengedepankan modal-modal sosial kolektif dalam rangka menjaga hubungan-hubungan produksi, ikatan pekerjaan, kekerabatan, etnis, dan komunitas keagamaan. Wacana yang dipahami ini mendorong aktor menerapkan kehidupan kolektif dengan landasan keadilan dan kebersamaan.

Ketika negara merubah paradigma tata kelola sumber daya dari *economic development* menuju *sustainable development* pada pertengahan tahun 1990-an, sesungguhnya masyarakat Bali sudah menerapkan hal tersebut secara konsisten. Negara baru mengakui alam secara politis dalam studi politik-ekonomi bahwa selayaknya alam dan manusia merupakan entitas organisme yang seharusnya hidup bersama di bumi ini (Kapoor 2001). Masyarakat Bali justru menganut ideologi *Tri Hita Karana* dan menerapkannya dalam seluruh kegiatan sosial-ekonomi-ekologi-religius.

Kasus Bali, aktor di atas dikelompokkan menjadi tiga dan membentuk relasi kuasa yang menghadirkan ketidaksetaraan sebagai dampak terbentuknya ruang kekuasaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air. Pada masing-masing kelompok terdapat aktor-aktor yang berinteraksi dan mempunyai relasi sosial sesamanya yang berada dalam ruang konflik karena memiliki basis kekuasaan sendiri-sendiri serta terjadi pada level dan arena yang beragam. Secara sederhana dapat digambarkan seperti pada Tabel 2.

Pesatnya pembangunan dan meningkatnya kompleksitas masyarakat berbanding lurus dengan jumlah aktor yang ikut dalam persaingan pemanfaatan air. Situasi ini sejalan dengan

menurunnya kuantitas dan kualitas air sebagai dampak rusaknya lingkungan dan sumber-sumber air. Dominasi wacana dan kekuatan akses terhadap air umumnya memenangkan aktor dalam konflik. Penguasaan teknologi, modal, dan relasi menguatkan aktor untuk mengimplementasikan wacana untuk diwujudkan menjadi sebuah keuntungan (Susan 2009).

Interrelasi Kasus Lokal dengan Global

Seperti telah diungkap sebelumnya, persoalan air di Bali tidak memadai dipandang sebatas persoalan lokal. Pada aras global, isu lingkungan yang menjadi embrio adalah lahirnya *Rio Earth Summit 1992* dilanjutkan dengan Konferensi Internasional Air. Efek resonansinya memunculkan Deklarasi Dublin yang berlaku pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Reposisi kebijakan lembaga-lembaga internasional dan agen pembangunan bilateral telah mendorong *private sector participation* (Kruha 2011). Disinilah rekam jejak persoalan air di Bali memiliki interrelasi yang kuat dengan persoalan dan pertarungan di tingkat global.

Secara sistematis kebijakan politik pengaturan yang memenangkan pertarungan di tingkat global, diadopsi dan diperkuat dengan kebijakan di tingkat nasional dan daerah, kemudian dioperasionalkan versus kebijakan nonformal

Tabel 2. Peta aktor dan ideologi politik sumber daya air di Bali

No.	Aktor berkepentingan	Ideologi politik ekonomi dan lingkungan hidup	Wacana yang digulirkan	Upaya akses	Kegunaan
1.	Negara/state (pemerintah pusat dan daerah)	<i>Budget politic dan welfarian</i>	SDA dikuasai negara, sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.	- Pengaturan kebijakan - Program pembangunan	Air dijual untuk memperoleh pemasukan APBN, PAD, Keuangan desa
2.	Swasta (PDAM, pengusaha AMDK, AMIU, penginapan dan restoran, sarana pariwisata: <i>laundry</i> , salon, kolam renang, wisata tirta)	<i>Kapitalis profitisme</i>	Air sumber daya ekonomi produktif	- Memiliki izin resmi - Memiliki pengetahuan dan modal	- Air untuk dijual langsung atau diolah terlebih dahulu. - Air mendukung kepentingan masyarakat kota dan sektor pariwisata
3.	Petani subak dan masyarakat perdesaan	<i>Welfarian kolektivisme</i>	Air adalah sumber kehidupan	- Memelihara sumber dan saluran air untuk keberlanjutan - Pentingnya swasembada pangan - Mengatur pemanfaatan air dengan tertib dan tegas, adil dan kebersamaan	- Air untuk konsumsi - Air untuk pertanian - Air untuk upacara dan ritual

Sumber: Tarigan (2015), diolah

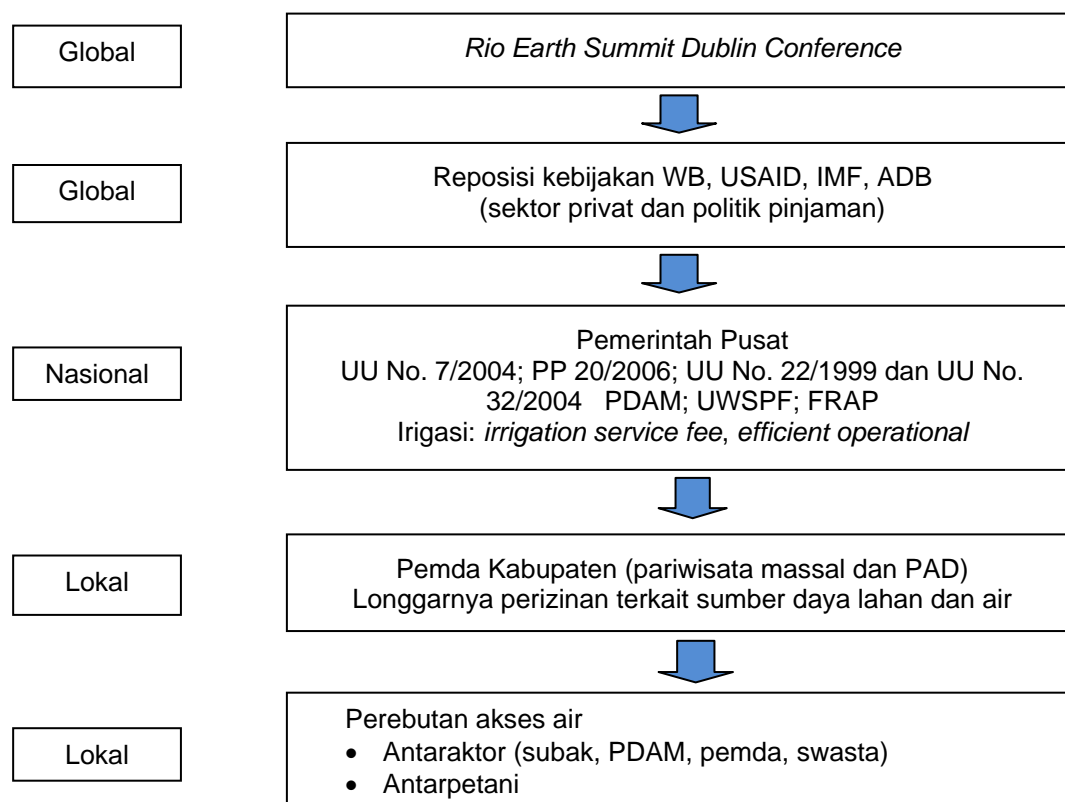
produk kuasa pengetahuan lokal masyarakat yaitu subak. Pertarungan di tingkat global dan nasional lebih merupakan pertarungan pengetahuan dan gagasan telah melahirkan aturan dan kebijakan yang berada di ruang konflik dengan aspek immaterial. Berbeda dengan pertarungan di tingkat lokal, lebih merupakan pertarungan kemampuan untuk memanfaatkan air, pertarungan yang berada dalam ruang kekuasaan, di mana keadilan dipertaruhkan.

Akhirnya, pertarungan menempati dua ruang yang masing-masing memainkan alat yang berbeda. Ruang pertama tempat pertarungan kuasa pengetahuan (konflik immaterial) yang melahirkan kekuatan berbentuk undang-undang atau kebijakan sebagai alat taktis yang memiliki kuasa untuk memenangkan pengaturan. Ruang ini terjadi pada aras global, nasional, maupun lokal (daerah). Ruang kedua adalah ruang yang sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mendapatkan keuntungan material dari sumber daya yang diperebutkan. Pengetahuan, teknologi, modal, dan relasi-relasi sosial menjadi alat yang menentukan akses para aktor terhadap sumber daya air. Ruang ini terjadi di aras lokal dan sarat dengan konflik, baik konflik antaraktor maupun antarinternal petani.

PERKIRAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA BALI KE DEPAN

Orientasi pembangunan adalah peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi sebagai langkah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya alam. Beberapa dampak yang sangat signifikan adalah terjadinya degradasi lingkungan dan semakin terdesaknya sektor pertanian khususnya tekanan terhadap faktor lahan dan air. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbentuk pengaturan yang serba formal, seragam, serentak, prosedural dan "kejar target". Kelembagaan subak yang sarat dengan nilai-nilai tekno-sosio-budaya-religius mengalami peluruhan dan ruang gerak operasionalnya yang semakin sempit. Akhirnya, kontribusinya dalam pembangunan semakin berkurang.

Proses transformasi basis utama ekonomi dan sosial budaya dari pertanian menjadi industri merupakan konsekuensi dari orientasi pembangunan modernisasi. Petani subak menciptakan kelompok di dalam komunitasnya, berorganisasi dengan orientasi tujuan lebih luas dari sekedar urusan pengairan dan usaha tani, bergerak mengikuti satuan waktu dan teknis usaha tani anjuran pemerintah, meningkatkan



Gambar 1. Interrelasi kasus lokal Bali dengan tingkat global

hubungan dengan pihak-pihak luar (negara, pasar, dan perbankan) dan secara bersamaan melonggarkan hubungan-hubungan internal yang kental.

Pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi melalui politik lingkungan dengan orientasi pariwisata massal menyebabkan beberapa ancaman bagi sektor pertanian. (1) Semakin sempitnya lahan (terutama lahan sawah) untuk kegiatan pertanian menyebabkan sistem pertanian semakin inefisien. Kondisi ini mengancam kemampuan Bali untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Perlu disadari, pertanian sawah yang rapi dengan kontur bertingkat merupakan salah satu daya tarik destinasi pariwisata Bali. Di sisi lain, peningkatan jumlah wisatawan ke Bali membutuhkan beragam produk pertanian sebagai pendukung wisata. Jika tidak diantisipasi maka kebutuhan-kebutuhan tersebut harus didatangkan dari luar Bali. (2) Degradasi lingkungan menyebabkan kelangkaan air, baik untuk pertanian maupun keperluan konsumsi, termasuk air untuk keperluan mendukung pariwisata yang cukup besar. Kondisi ini telah menyebabkan munculnya konflik pemanfaatan air baik antarsektor maupun antardaerah. (3) Peluruhan nilai dan norma kelembagaan lokal subak yang sarat dengan nilai sosial budaya dan beragam ritual sekaligus pelaku utama kegiatan pertanian dan menjadi tarik utama pariwisata Bali. (4) Serbuan migrasi masuk, khususnya untuk penduduk usia kerja, mengancam peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga setempat.

Ancaman terhadap sektor pertanian sekaligus ancaman bagi pariwisata Bali di masa depan. Daya tarik alam Bali berupa pantai, gunung, dan sawah bertingkat dilengkapi dengan ritual-ritual keagamaan yang merata di tempat-tempat tersebut adalah daya tarik Bali yang hampir tidak ditemukan di tempat lain. Pembangunan fisik berupa gedung, museum atau pasar-pasar modern lain bukan tujuan wisata yang khas karena banyak didapati pada wilayah atau destinasi lain di dalam maupun luar negeri. Menggunakan bahasa lain, Wijaya (2015) menyebutkan, daya dukung pariwisata Bali yang harus tetap dipelihara, seperti adanya resonansi yang baik, sumber daya yang memadai, kondisi objek yang tetap menarik, tersedianya fasilitas penunjang kepariwisataan, dan situs-situs sebagai daya tarik wisatawan Bali. Realitanya, sudah lebih dari 60% lahan pertanian telah berubah jadi bangunan. Guna kepentingan komersialisasi, kultur budaya asli masyarakat Bali mengalami perubahan. Orientasi ekonomi menyebabkan masyarakat Bali kehilangan identitas budaya yang sebenarnya

menjadi daya tarik utama para wisatawan berkunjung ke Bali. Berdasarkan survei yang dilakukan Dinas Pariwisata Bali 2003 disampaikan bahwa secara umum penilaian wisatawan terhadap Bali masih positif, yaitu 84,07% wisatawan menyatakan alam Bali masih asli, 65,11% penduduknya masih terlihat ramah, dan 52,87% karena daya tarik kebudayaan di mana 18,20% karena upacara adat dan budaya yang tetap dipelihara. Beberapa tahun kemudian Winus menjelaskan bahwa 51,98% daya tarik Bali karena alam yang masih menarik, 40,65% daya tarik kebudayaan, dan 19,55% penduduk yang ramah. Namun, beberapa tahun terakhir khususnya untuk alam dan kebudayaan telah mengalami perubahan.

Daya tarik pariwisata Bali terdapat pada lansekap alam, sosial budaya, dan keramahan penduduknya. Oleh karena itu, faktor-faktor yang berkaitan dengan itu perlu terus dipelihara. Pembangunan yang mengancam daya tarik khas Bali dibanding destinasi lain di dunia perlu secepatnya dipertahankan sehingga wisatawan tetap memiliki alasan untuk berkunjung, baik untuk liburan, investasi, atau berdagang, maupun sekedar rapat/seminar dan sejenisnya. Keterbukaan Bali yang masih kental dan khas akan menjadi kekuatan pariwisata Bali yang tidak dimiliki destinasi lain.

PENUTUP

Politik pembangunan perekonomian dan pariwisata Bali yang berorientasi pertumbuhan, dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dan air. Pembangunan fisik dengan pemanfaatan energi dan aneka sumber daya alam untuk mendukung pengembangan pariwisata massal, tidak saja mendorong terjadinya perubahan ekologi, tetapi sekaligus mendorong terjadinya transformasi sosial-ekonomi-budaya masyarakat dari pertanian menjadi jasa dan perdagangan. Pemeliharaan lingkungan dari keberlanjutan yang dimotori kelembagaan subak menjadi kemanfaatan yang dimotori oleh pemerintah dan pengusaha.

Strategi pembangunan berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat maupun daerah secara signifikan. Namun, dalam jangka panjang tidak mampu memelihara aspek mendasar keunikan alam maupun kelembagaan subak seperti yang termanifestasi dalam sawah bertingkat, sistem pertanian, dan sistem kekerabatan yang memuat kelengkapan nilai sosial budaya masyarakat Bali yang khas

(Tarigan dan Simatupang 2014). Pertanian sebagai induk budaya yang kaya dengan ritual-ritual adat dan keagamaan sebagai ejawantah dari landasan idiil *Tri Hita Karana* akhirnya mengarah menjadi instrumen ekonomi. Apabila tidak dilakukan evaluasi dan reorientasi pembangunan, destinasi Bali dengan alam yang indah disempurnakan oleh masyarakatnya yang ramah dan kultur yang khas, tidak lagi memiliki daya pikat yang kuat.

Politik lingkungan dengan dasar perhitungan ekonomi semata justru potensial menekan alam dan kultur asli masyarakat Bali. Paradigma ekologi politik mestinya berperan sebagai basis fundamental bagi manajemen pengelolaan sumber daya alam alternatif dan pemberian ruang afirmasi politik bagi kearifan lokal melalui kebijakan pelestarian lingkungan (Jati 2012). Disarankan, Bali lebih menekankan pengembangan jenis wisata yang berbasis pada lingkungan, memelihara nilai keseimbangan dengan memperhitungkan risiko-risiko kerusakan lingkungan yang dikenal dengan ekowisata. Guna menjaga pesona alam dan teknologi pertanian dengan sistem pengairan yang diatur menurut gaya subak, agrowisata dan kulturwisata merupakan jenis wisata yang juga prospektif dikembangkan. Ketiga jenis wisata ini menganut karakteristik kebersamaan dan keberlanjutan, suatu karakteristik dasar masyarakat Bali. Pariwisata tidak sepenuhnya dalam skenario para investor, tetapi masyarakat Bali sendiri ikut berpartisipasi. Bagi wisatawan, destinasi di atas menarik karena memuat unsur edukasi sekaligus rekreasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang telah memfasilitasi penulisan ini. Ungkapan rasa terima kasih yang sama disampaikan juga kepada Dewan Redaksi, Mitra Bestari, serta semua pihak yang membantu dan mendukung sehingga tulisan ini dapat tersusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo S. 2005. Dongi-dongi-culmination of a multi-dimensional ecological crisis: a political ecology perspective [Inaugural-Dissertation]. [Den Haag (NL)]: Der Universitat Kassel.
- Adiwibowo S, Shohibuddin M, Kartodihardjo H. 2010. Contested devolution: the political ecology of community-based forest management in Indonesia. Bogor (ID): Bogor Agricultural University.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2012. Bali dalam angka 2011. Denpasar (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Blaikie P, Brookfield H. 1987. Defining and debating the problem. London (UK): Methuen.
- Bryant RL 1998. Power, knowledge and political ecology in the third world: a review. *Phys Geogr.* (22)1:79-94.
- Bryant RL, Bailey S. 1997. Third world political ecology. London (UK): Routledge.
- Caretourism. 2013. Pariwisata massal dan implikasinya [Internet]. [diunduh 2016 Oct 3]. Tersedia dari: <https://caretourism.wordpress.com/2013/09/20/pariwisata-massal-dan-implikasinya/>.
- Cole S. 2012. A Political ecology of water equity and tourism: a case study from Bali. *Ann Tourism Res.* (39)2:1221-1241.
- Dharmawan AH. 2005. Mewujudkan good ecological governance dalam pengelolaan sumber daya alam. Studi Aksi Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan LPM IPB bekerja sama dengan UNDP - Partnership Indonesia. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Dharmawan AH. 2007. Memahami dinamika kawasan perdesaan: perspektif ekologi manusia, sosiologi lingkungan dan ekologi politik. Bahan kuliah Ekologi Politik Kawasan dan Perdesaan pada jenjang S3 program studi/mayor Sosiologi Perdesaan. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat.
- Escobar A. 1998. Whose knowledge. Whose nature. Biodiversity, conservation and the political ecology of social movements. *J Poll Ecol.* (5)1:53-82.
- Forsyth T. 2003. Critical political ecology. The politics of environmental science. London (UK): Routledge Taylor and Francis Group.
- Gurung CP. 1995. People and their participation new approaches to resolving conflicts and promoting cooperation. In: McNeely JA, editor. *Expanding partnership in conversation.* Washington, DC (US): Island Press. p. 223-233.
- Homer-Dixon TF. 1994. Environmental scarcities and violent conflict: evidence from cases. *Int Secur.* 19(1):5-40.
- Jati WR. 2012. Manajemen tata kelola sumber daya alam berbasis paradigma ekologi politik. *J Ilmu Polit.* 3(2):1-14.
- Johnson DP. 1990. Teori sosiologi klasik dan modern. Robert MZ, penerjemah. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kapoor I. 2001. Towards participatory environmental management. *J Environ Manag.* 63(3):269-279.
- Kartiwa B, Pawitan H. 2010. Degradasi sumber-sumber air: faktor penyebab dan langkah-langkah

- yang diperlukan. Dalam: Suradisatra K, Pasaribu SM, Sayaka B, Dariah A, Las, Haryono, Pasandaran E, editors. Membalik kecenderungan degradasi sumber daya lahan dan air. Bogor (ID): IPB Press. hlm. 161-181.
- Kruha. 2011. Sejarah dan konteks restrukturisasi sumberdaya air di Indonesia [Internet]. [diunduh 2013 Mar 20]. Tersedia dari http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/13/91/Hak_Atas_Air/Sejarah_dan_Konteks__Restrukturisasi_Sumberdaya_Air_di_Indonesia.html
- McCarl BA, Reilly JM. 1999. Water and the agricultural climate change assessment: issues from the stand point of agricultural economists. Proceedings of American Water Resources Association Special Conference on Potential Consequences of Climate Variability and Change to Water Resources; Atlanta, Georgia.
- Pasandaran E. 2005. Reformasi irigasi dalam kerangka pengelolaan terpadu sumber daya air. Anal Kebijak Pertan. 3(3):217-235.
- Pitana IG. 1993. Subak, sistem irigasi tradisional di Bali: sebuah deskripsi umum. Dalam: Pitana IG, editor. Subak sistem irigasi tradisional di Bali: sebuah canangsari. Denpasar (ID): Penerbit Upada Sastra.
- Pranadji T, Suhaeti R N. 2012. Masa depan pertanian pedesaan di Bali dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah. Anal Kebijak Pertan. 10(3):225-238
- Purwita IBPt. 1993. Kajian sejarah subak di Bali. Dalam: Pitana IG, editor. Subak sistem irigasi tradisional di Bali: sebuah canangsari. Denpasar (ID): Penerbit Upada Sastra.
- Robbins P. 2004. Political ecology: a critical introduction. Oxford (UK): Blackwell.
- Sosiawan H, Subagyono K. 2009. Strategi pembagian air secara proporsional untuk keberlanjutan pemanfaatan air. Pengemb Inov Pertan. 2(4):299-305
- Stern N, Peters S, Bakhshi V, Bowen A, Cameron C, Catovsky S, Crane D, Cruickshank S, Dietz S, Edmonson N, et al. 2006. Stern review: the economics of climate change. London (UK): HM Treasury.
- Suardana W. 2009. Krisis air di Bali dan konflik yang menyertai. Denpasar (ID): Walhi Bali.
- Susan N. 2009. Sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer. Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Group.
- Tarigan H. 2004. Representasi pemuda pedesaan mengenai pekerjaan pertanian: kasus komunitas perkebunan teh rakyat di Jawa Barat. ICASERD Working Paper No. 29. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Tarigan H. 2015. Peluruhan kelembagaan lokal subak: analisis konflik kepentingan sosial-ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali [Disertasi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.
- Tarigan H, Simatupang P. 2014. Dampak undang-undang sumber daya air terhadap eksistensi kelembagaan subak di Bali. Anal Kebijak Pertan. 12(2):103-117
- Wiguna IWAA, Surata SPK. 2008. Multifungsi ekosistem subak dalam pembangunan pariwisata di Bali. Yogyakarta (ID): Aksara Indonesia.
- Wijaya K. 2015. Masa depan pariwisata Bali (Perspektif permasalahan dan solusinya). J Riset Ekon Manaj. (15)1:118-135.
- Windia W. 2010. Jalan lurus menuju kehancuran Subak [Internet]. [diunduh 2013 Apr 8]. Tersedia dari: <http://www.bisnisbali.com/2007/02/20/news/opini/hjkl.html>.
- Windia W. 2013. Subak warisan budaya dunia. Denpasar (ID): Udayana University Press.
- Wulan TR. 2007. Ekofeminisme transformatif: alternatif kritis mendekonstruksi relasi perempuan dan lingkungan. Sodality. 1(1):105-130.